

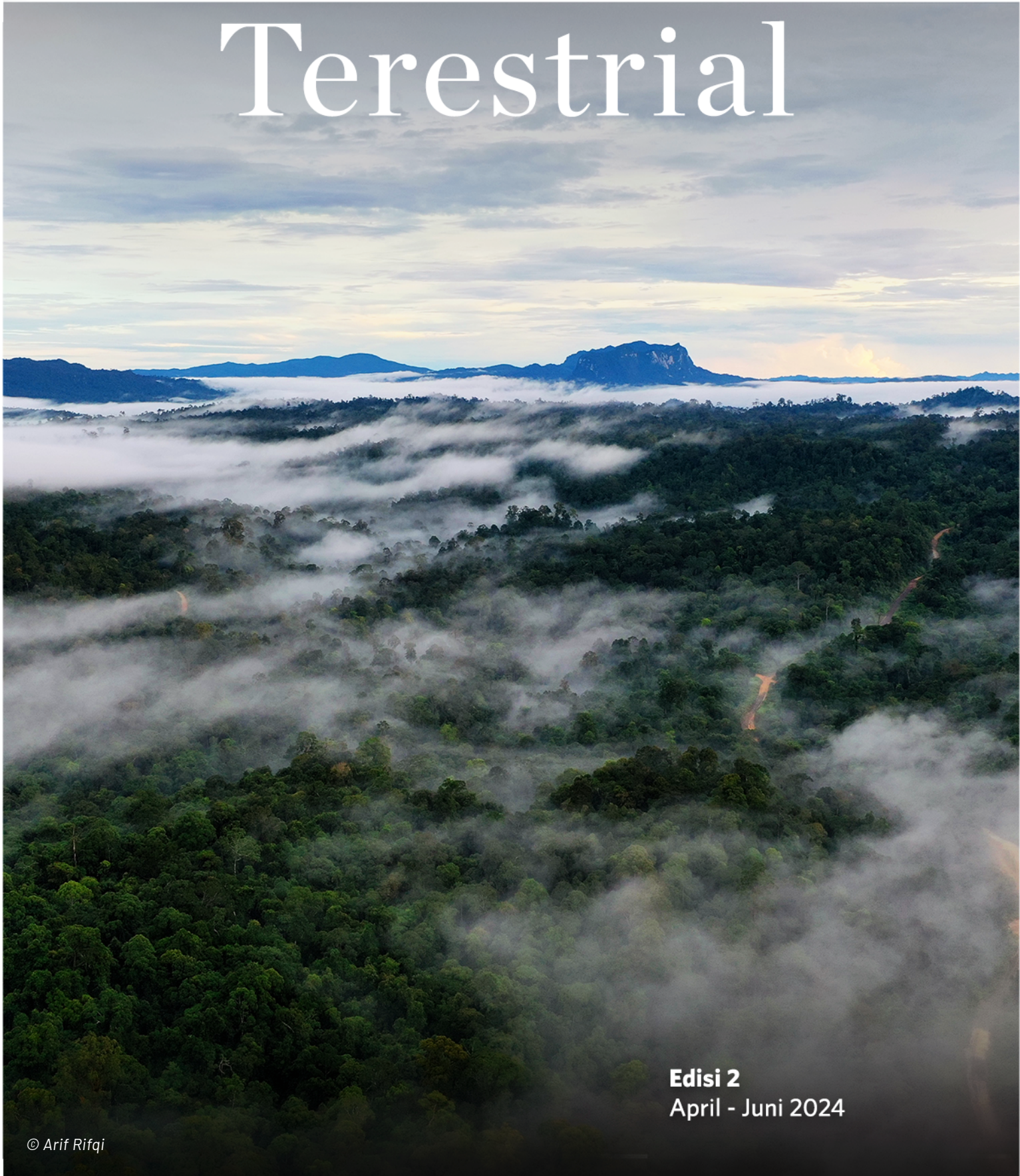
10
2014 - 2024

Konservasi
Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari



Kabar

Terrestrial



Edisi 2
April - Juni 2024

KANTOR YKAN

Kantor Jakarta: Graha Iskandarsyah Lantai 3,
Jl. Iskandarsyah Raya No. 66C, Kebayoran Baru,
RT 5/RW 2, Melawai, Jakarta Selatan, 12160
Telp: +62-21-7279 2043

Kantor Samarinda: Jl. Siradj Salman, Grand
Mahakam Residence, Blok N-1, Teluk Lerong Ilir,
Samarinda Ulu, Kalimantan Timur, 75128

Kantor Berau: Jl. Cempaka II No. 7 RT 07/RW 07
Tanjung Redeb, Berau 77311, Kalimantan Timur
Telp: +62-554-233 88
Fax: +62-554-218 14

**Konservasi
Alam Nusantara**

Untuk Indonesia Lestari



Lanskap Beriun-Gergaji, Habitat Penting Orang Utan Kalimantan di Kutai Timur.

© Arif Rifqi



©YKAN



© Arif Rifqi

Orang utan Kalimantan (*Pongo pygmaeus morio*) adalah **spesies yang habitatnya perlu untuk dipertahankan**. Di Kalimantan Timur, Bentang alam Beriun-Gergaji adalah salah satu habitat penting bagi orang utan liar ini. Kawasan ini berada di sekitar ekosistem karst di Kecamatan Karanganyan, Kecamatan Bengalon, dan Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Selain sebagai habitat alami, area ini juga bagian dari Karst Sangkulirang yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Sangkulirang-Mangkalihat.

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), perusahaan dan masyarakat setempat melakukan studi dan survei lapangan di kawasan ini pada 2022. Tujuannya melihat potensi terkini keanekaragaman hayati untuk mendukung pengelolaan Bentang Alam Beriun-Gergaji sebagai habitat alami orang utan. Tim peneliti menyurvei kawasan seluas 106.906 hektar, yang didalamnya terdapat berbagai jenis perusahaan dan dua Lembaga Pengelolaan Hutan Desa. Lanskap ini memiliki empat jenis kawasan hutan yang sesuai untuk habitat orang utan, yaitu Hutan Lidung (HL), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi Konversi (HPK), serta kawasan berhutan di Area Penggunaan Lain (APL).



©YKAN

Pada Mei 2024, terbitlah laporan kompilasi berdasarkan hasil survei dan diskusi dengan para peneliti. Kawasan hutan terluas adalah HPT dengan luas area 69.604 Ha dan mendominasi di Lanskap Beriun dan Gergaji. Kemudian diikuti, HP seluas 32.138 Ha.

Terakhir, adalah HL dengan luas 4.493 Ha. Meskipun kecil, HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Sehingga HL diharapkan bisa menjadi habitat utama bagi orang utan liar. APL di sisi barat lokasi kajian juga termasuk kedalam habitat yang sesuai namun dengan luas area yang relatif kecil, yaitu 671 Ha.

Adanya data-data tersebut, menjadi rekomendasi model pengelolaan habitat orang utan alami. YKAN sudah mendorong pengelolaan ekosistem habitat orang utan secara multipihak di Wehea-Kelay, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Upaya yang sudah berjalan baik di Wehea-Kelay, bisa menjadi referensi atau replikasi pengelolaan di Beriun-Gergaji.

POTENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI BERIUN-GERGAJI

- Orang utan lebih banyak di sisi tengah-selatan

- 42 jenis mamalia, 195 jenis burung, 67 jenis herpetofauna, 220 jenis tumbuhan, 38 jenis kelelawar, dan 85 jenis kupu-kupu

- Kepadatan Orang Utan 0.17-1.1 individu/km².
Owa Kalimantan (*Hylobates funereus*) 0.8-2 kelompok/km²



©YKAN

Dukungan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kutai Kartanegara

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) bekerja sama dengan Yayasan Biosfer Manusia (Bioma) untuk mengidentifikasi potensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kerja sama ini diawali pada 2022, tepatnya di Kecamatan Tabang. Pada kajian awal tersebut, terindikasi beberapa komunitas Dayak, seperti Dayak Punan, Dayak Kenyah dan Dayak Kayan. Berdasarkan potensi tersebut, maka asesmen pun diperluas dalam skala kabupaten. Sehingga diharapkan lebih banyak yang teridentifikasi, dan mempercepat proses penetapannya menjadi MHA.

Selain support untuk kegiatan identifikasi beberapa komunitas calon MHA di Kukar, BIOMA juga melakukan diskusi intensif kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa [DPMD Kab. Kukar] guna memberikan pendampingan awal bagi panitia MHA,

Gayung bersambut dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang pada 2023 mengeluarkan Surat Keputusan Bupati No 355/SK-BUP/HK/2023 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Maka di awal tahun 2024 ini, YKAN melalui strategi Konservasi Hutan untuk Masyarakat memulai memperluasnya di 11 Kecamatan. Yayasan Bioma sebagai mitra lokal melakukan wawancara dan pertemuan di tingkat desa pada kecamatan-kecamatan tersebut. Kegiatan dilakukan dalam dua tahap untuk menyisir semua potensi.



©YKAN

Identifikasi ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari YKAN dan Yayasan Bioma terhadap kegiatan Panitia MHA Kutai Kartanegara. Lantaran data-datanya berguna sebagai dokumen etnografi yang menjadi acuan dalam kegiatan verifikasi dan validasi MHA. Status MHA akan membantu komunitas dalam mempertahankan hak-hak istimewa sebagai masyarakat adat. Hak tersebut bisa berupa pengelolaan sumber daya alam, pelestarian tradisi budaya, serta hak khusus lainnya.

Di Kalimantan Timur, MHA berhak mendapatkan insentif berbasis kinerja dari Bank Dunia melalui skema Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) yang berlangsung hingga 2025. Insentif ini merupakan penghargaan dari masyarakat global atas keberadaan MHA baik yang desanya berhutan maupun tidak. Namun, tujuan utama penetapan status MHA adalah memberikan hak kepada masyarakat adat, yaitu hak ulayat.

Tabel 7. Daftar Komunitas MHA yang Telah Memiliki Kelengkapan Dokumen Etnografi dan dapat di verifikasi:

No	Komunitas / Etnis	Desa	Status Perkembangan
1.	Kayan Uma Lasan	Desa Long Lalang	Dokumen telah diserahkan ke panitia MHA dan menunggu perbaikan
2.	Kenyah Lepo Bem	Desa Lekaq Kidau	Dokumen telah diserahkan ke panitia MHA
3.	Kenyah Lepo Jalan Lung Anai	Desa Lung Anai	Dokumen telah diserahkan ke panitia MHA
4.	Kenyah Lepo Jala Sungai Bawang	Desa Sungai Bawang	Dokumen telah diserahkan ke panitia MHA
5.	Kutai Adat Lawa	Desa Kedang Ipil	Dokumen telah diserahkan ke panitia MHA
6.	Punan Bekatan	Desa Muara Tuboq	Dokumen telah diserahkan ke panitia MHA dan menunggu perbaikan



©YKAN

CRD
CENTER FOR RESEARCH & DEVELOPMENT
KUTAI KARTANEGARA



© Meita Annissa/YKAN

Kalpataru untuk Punan Batu

Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini, Masyarakat Hukum Adat Punan Batu Benau Sajau terpilih menerima penghargaan Kalpataru yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) "Kami bersyukur karena upaya kami menjaga hutan sebagai tempat hidup kami diakui pemerintah pusat di Jakarta," ujar Maruf, Tetua Masyarakat Hukum Adat Punan Batu dalam taklimat media bertajuk Legalitas Hutan Adat untuk Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Punan Batu Sajau Benau, di Jakarta, Kamis 6 Juni 2024.

Taklimat media ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Bambang Supriyanto, Bupati Bulungan Syarwani, Peneliti dari Mochtar Riady Institute Pradiptajati Kusuma, Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Herlina Hartanto, dan perwakilan Masyarakat Hukum Adat Punan Batu Maruf dan Samsul. Maruf mengatakan impian warga Punan Batu adalah hutan tempat hidup mereka tetap terjaga dan utuh.

Karena itu setelah membawa pulang Kalpataru, MHA Punan Batu, terus berharap agar wilayah tinggal mereka yaitu Hutan Benau dapat segera ditetapkan sebagai Hutan Adat. Penetapan ini penting untuk memastikan luas kawasan hutan tidak semakin berkurang atau tidak beralih fungsi. "Wilayah hidup kami semakin terbatas, semoga kami bisa mendapatkan jaminan atas hutan sebagai tempat tinggal kami," kata dia menambahkan.



© Meita Annissa/YKAN





© Chris Djoka/YKAN

Pada tahun ini, MHA Punan Batu mendapat Kalpataru untuk kategori penyelamat lingkungan (Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 574 Tahun 2024 tentang Penerima Penghargaan Kalpataru 2024). “Penghormatan atas hutan oleh Masyarakat Punan Batu, adalah pertimbangan utama kami dalam memberikan Kalpataru ini,” ujar Direktur Jendral PSKL KLHK Bambang Supriyanto. Menurut Bambang, kearifan warga bahkan dalam mengambil hasil hutan dengan penuh pertimbangan, adalah bentuk dari upaya melindungi dan menyelamatkan lingkungan. “Mereka memotong rotan saja, memilih yang benar-benar tua,” kata Bambang. Sehingga Kementerian menilai bahwa apa yang sudah dilakukan oleh MHA Punan Batu perlu diapresiasi dan diketahui publik guna menginspirasi khalayak, salah satunya dengan memberi penghargaan Kalpataru ini.

Sepulangnya dari Jakarta, pada 12 Juni dilakukan arak-arakan Kalpataru mengelilingi kota Tanjung Selor, Ibu kota Kabupaten Bulungan. Sejumlah warga Punan Batu pawai keliling selama sekitar 1 jam dengan titik kumpul di Kebun Raya Bundayati. Perayaan ini adalah jerih perjalanan panjang warga Punan Batu untuk mendapatkan status resmi hutan mereka, yang sekaligus tempat hidup dan bermukim.

